



Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Nita Putri Cahyani^{1*}, Oryza Tannar²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

* E-mail Korespondensi: oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 28-05-2025

Revision: 03-05-2025

Published: 02-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.860

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dengan fokus pada 17 desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 64 aparatur desa yang dipilih secara purposive, berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa penggunaan Siskeudes tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, penerapan SPIP terbukti berkontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam tata kelola dana desa tidak semata-mata bergantung pada penerapan sistem berbasis teknologi informasi, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, serta nilai-nilai akuntabilitas yang melekat dalam budaya organisasi.

Kata Kunci: Siskeudes, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas, Dana Desa

A B S T R A C T

This study aims to examine the influence of the Village Financial System (Siskeudes) and the Government Internal Control System on the accountability of village fund management, focusing on 17 villages located in Waru District, Sidoarjo Regency. A quantitative approach was employed, with data collected through questionnaires distributed to 64 village officials selected using purposive sampling based on specific criteria. Data analysis was conducted using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with the assistance of SmartPLS version 4.0 software. The results revealed that the implementation of

Acknowledgment

Siskeudes did not have a significant impact on the accountability of village fund management. In contrast, SPIP demonstrated a significant and positive effect on accountability. These findings suggest that successful financial governance at the village level is not solely determined by the presence of information technology systems, but also heavily influenced by the quality of internal controls, the capacity of village personnel, and an organizational culture rooted in accountability.

Key word: *Siskeudes, Government Internal Control System, Accountability, Village Funds*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia mulai menyalurkan Dana Desa sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berbasis pada penguatan pemerintahan dan kemandirian desa. Program ini bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mendorong pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Selama periode 2015 – 2020, alokasi anggaran dana desa terus meningkat signifikan, dari Rp. 280 juta per desa menjadi Rp. 950 juta per desa, dengan total anggaran mencapai Rp. 71,19 triliun pada tahun 2020 (Sirait & Octavia, 2021). Kebaruan laporan BPS di tahun 2020 – 2023 menunjukkan bahwasanya anggaran dana desa secara nasional kembali meningkat menjadi lebih dari Rp. 72 triliun pada tahun 2022 (Apresziyanti et al., 2024).

Salah satu yang mencatat angka signifikan adalah Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo, yang pada tahun 2024 memiliki rata – rata dana desa tertinggi kabupaten tersebut, yaitu sebesar Rp. 1,2 miliar per desa. Kondisi ini memberikan peluang untuk menilai bagaimana dana desa dikelola dan dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan yang merata, sekaligus mengidentifikasi tantangan guna merealisasikan pengelolaan yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, pencapaian angka yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pengelolaan yang baik. Selama empat tahun terakhir, total dana desa di Kecamatan Waru menunjukkan tren fluktuatif, mulai dari Rp. 37,1 miliar pada tahun 2021, turun signifikan di tahun 2022 dan 2023, lalu naik sedikit menjadi Rp. 21,3 miliar pada tahun 2024. Perubahan ini mencerminkan dinamika penyaluran dana desa yang diatur dalam PMK No. 146 Tahun 2023, yang menggunakan formula berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing–

masing desa. Namun, besarnya dana desa yang dialokasikan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan. Kasus-kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kecamatan Waru dapat mengindikasikan lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

Ketiadaan sistem pengawasan yang efektif membuka celah terjadinya praktik koruptif oleh aparat desa. Seperti yang terjadi, di Desa Tambaksawah, kepala desa menyalahgunakan pendapatan dari aset desa berupa rumah susun sewa (rusunawa), yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp9,7 miliar (Suparno, 2024). Sementara itu, di Desa Tambakoso, kepala desa dilaporkan warga karena menarik biaya ilegal dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Warga diminta membayar antara Rp1,5—5 juta untuk proses balik nama surat tanah, yang mana program ini seharusnya dibiayai penuh oleh pemerintah tanpa adanya pungutan (Teguh, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang tersedia cukup besar, masih terdapat celah dalam pengelolaannya, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Eprilsa & Budiwitjaksono (2022) untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah terus mendorong pemanfaatan sistem informasi akuntansi atau juga dikenal Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Program tersebut dibuat guna merekam seluruh aktivitas finansial desa secara menyeluruh, mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga mempermudah proses audit dan mendukung transparansi pengelolaan dana desa. Siskeudes juga mempermudah pengelolaan keuangan dengan menyederhanakan berbagai proses administratif serta mendukung pembuatan laporan keuangan yang sesuai regulasi (Hasliani & Yusuf, 2021). Penelitian yang dikaji Arfiansyah (2020) serta Ardianti & Suartana (2020) memperkuat pernyataan tersebut dengan mengindikasikan bahwasanya penggunaan Siskeudes berdampak positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sebaliknya, penelitian dari Reu & Lasdi (2021) mengindikasikan bahwasanya implementasi sistem tersebut belum menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Selain dukungan teknologi, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Menurut Arfiansyah (2020), Penerapan SPIP menjadi hal penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak terhadap akuntabilitas tata pengelolaan keuangan di desa.

Namun, kesuksesan implementasinya akan tetap sangat bergantung pada keberadaan dan efektivitas SPIP. Sebagaimana PP No. 60 Tahun 2008, SPIP bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah kerangka kerja integral yang melekat pada seluruh aktivitas pemerintahan desa, yang bertujuan menjamin efisiensi, integritas pelaporan keuangan, keamanan aset, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks ini, SPIP tidak hanya berperan sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis tata kelola yang baik. Penelitian oleh Indriasih & Sulistyowati (2022) serta Savitri et al. (2022) menguatkan argumen ini dengan menyatakan adanya hubungan positif antara penerapan SPIP dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Di sisi lain, hasil yang kontras dikaji oleh Kaharudin (2024), yang menegaskan SPIP tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan ini menandakan bahwasanya efektivitas SPIP mungkin bersifat kontekstual, tergantung pada bagaimana sistem tersebut diimplementasikan di masing-masing desa.

Untuk memahami bagaimana aparat desa menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola Dana Desa, penelitian ini menggunakan Teori Stewardship sebagai landasan. Teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis di tahun 1991 ini menyatakan bahwa pemimpin, dalam hal ini aparat desa, dipandang sebagai pengemban amanah dari masyarakat (*principal*). Sebagai “*steward*” atau pelaksana amanah, mereka seharusnya bertindak demi kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap tujuan kolektif menjadi inti dari teori ini (Ardianti & Suartana, 2020). Oleh karena itu, keberadaan sistem seperti Siskeudes dan SPIP dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk membantu aparat desa menjalankan amanah tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan paradigma positivistik, di mana proses pengumpulan serta pengolahan data numerik diaplikasikan guna mengkaji hipotesis yang ditawarkan di atas secara sistematis (Sugiyono, 2024:16-17). Fokus penelitian difokuskan pada aparat desa yang mengelola dana desa di 17 wilayah administratif Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Sumber data utama ialah data primer yang didapat melalui distribusi kuesioner langsung kepada para pemangku kebijakan desa seperti KepDes,

SekDes, Bendahara, dan Kaur Perencanaan. Teknik pengumpulan sampel secara nonprobabilistik dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden dengan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan studi, sehingga menghasilkan total 64 responden dari keseluruhan populasi sebanyak 162 orang.

Instrumen pengukuran variabel menggunakan skala likert lima poin, yang merepresentasikan persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan penelitian. Masing-masing variabel diukur dengan indikator, yaitu Siskeudes diukur dengan lima indikator utama yaitu keamanan sistem, ketepatan waktu input, keakuratan informasi, kesesuaian dengan regulasi, dan variasi format laporan (Ardianti & Suartana, 2020). SPIP mengacu pada lima komponen utama dari PP No. 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Akuntabilitas diukur berdasarkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan keuangan desa secara transparan dan bertanggungjawab (Arfiansyah, 2020). Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pendekatan SEM-PLS dengan memanfaatkan SmartPLS versi 4.0 sebagai instrumen guna membantu mengolah data.

HASIL

Uji Pengukuran Model (*Outer Model*)

Validitas Konvergen

Validitas konvergen merepresentasikan tingkat konsistensi internal antar indikator dalam satu konstruk, yakni indikator tersebut semestinya berkorelasi positif yang signifikan satu sama lain. Dalam studi, pengujian ini dijalankan dengan meninjau skor “*loading factor*” tiap indikator terhadap variabel laten yang diukurnya. Hal ini dianggap mempunyai validitas konvergen yang mencukupi bila nilainya $> 0,60$ (Sihombing et al., 2024).

Tabel 1. Hasil Uji *Convergent Validity*

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	SISKEUDES	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
X1.1.1	0.778	
X1.1.2	0.706	
X1.2.1	0.820	
X1.2.2	0.772	
X1.3.1	0.791	

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		SISKEUDES	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
X1.3.2		0.714	
X1.4.1		0.708	
X1.4.2		0.803	
X1.5.1		0.782	
X1.5.2		0.721	
X2.1.1			0.777
X2.1.2			0.703
X2.2.1			0.801
X2.2.2			0.806
X2.3.1			0.825
X2.3.2			0.859
X2.4.1			0.749
X2.4.2			0.741
X2.5.1			0.819
X2.5.2			0.825
Y1.1.1	0.869		
Y1.1.2	0.888		
Y1.2.1	0.745		
Y1.2.2	0.742		
Y1.3.1	0.764		
Y1.3.2	0.800		
Y1.4.1	0.783		
Y1.4.2	0.905		

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Mengacu pada Tabel 1, seluruh indikator bernilai $> 0,60$, sehingga diindikasikan bahwasanya seluruh item dinyatakan valid secara konvergen. Dengan begitu, butir-butir dalam kuesioner dinilai layak untuk proses analisis lanjutan.

Validitas Disriminan

Validitas diskriminan bertujuan menegaskan bahwa setiap konstruk memiliki identitas yang unik dan tidak tumpang tindih dengan konstruk lainnya. Pengujian dilakukan melalui observasi terhadap nilai *cross-loading*. Sebuah indikator memenuhi kriteria bila menunjukkan

nilai tertinggi pada konstruk asalnya dibandingkan nilai pada konstruk lainnya (Sihombing et al., 2024)

Tabel 2. Hasil Uji *Discriminant Validity*

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	SISKEUDES	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
X1.1.1	0.151	0.778	0.107
X1.1.2	0.075	0.706	0.036
X1.2.1	0.155	0.820	0.110
X1.2.2	0.077	0.772	0.043
X1.3.1	0.141	0.791	0.103
X1.3.2	0.039	0.714	0.047
X1.4.1	0.120	0.708	0.062
X1.4.2	0.184	0.803	0.011
X1.5.1	0.363	0.782	0.272
X1.5.2	0.170	0.721	0.091
X2.1.1	0.617	0.170	0.777
X2.1.2	0.523	0.148	0.703
X2.2.1	0.590	0.133	0.801
X2.2.2	0.540	0.078	0.806
X2.3.1	0.511	0.193	0.825
X2.3.2	0.601	0.057	0.859
X2.4.1	0.577	0.132	0.749
X2.4.2	0.548	0.097	0.741
X2.5.1	0.631	0.163	0.819
X2.5.2	0.625	0.083	0.825
Y1.1.1	0.869	0.278	0.569
Y1.1.2	0.888	0.276	0.664
Y1.2.1	0.745	0.050	0.579
Y1.2.2	0.742	0.124	0.542
Y1.3.1	0.764	0.122	0.523
Y1.3.2	0.800	0.154	0.655
Y1.4.1	0.783	0.335	0.553
Y1.4.2	0.905	0.279	0.656

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Mengacu dari Tabel 2, mampu diketahui bahwasanya seluruh indikator memenuhi angka faktor *loading* yang melebihi variabelnya sendiri dibandingkan dengan variabel lainnya. Maknanya, hal tersebut menunjukkan bahwasanya validitas diskriminan berdasarkan *cross loading* telah terpenuhi.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk menilai ukuran tiap indikator suatu variabel bisa menunjukkan stabilitas dan konsistensi internal. Pada studi ini, pengukuran reliabilitas dilakukan melalui dua parameter statistik, yakni Reliabilitas Komposit (CR) dan nilai *Cronbach's*

Alpha. Suatu konstruk dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang memadai apabila kedua nilai tersebut $> 0,70$. Adapun hasil penghitungan CR dan *Cronbach's Alpha* ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's alpha</i>	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.926	0.932	0.940	0.663
Siskeudes	0.926	1.039	0.932	0.579
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.933	0.935	0.944	0.627

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Merujuk pada Tabel 3, hasil pengujian terhadap CR dan nilai Alpha mengindikasikan performa yang andal, yakni seluruh konstruk laten mengindikasikan angka $> 0,70$. Hasil ini menegaskan bahwa keseluruhan variabel laten dalam model telah memenuhi kriteria reliabilitas dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Uji *Coefficient of Determination* (R^2)

Analisis terhadap model struktural berbasis pendekatan *Partial Least Square* diimplementasikan dengan menelaah angka R^2 pada konstruk laten dependen. Angka R^2 merepresentasikan ukuran variabilitas dari variabel dependen mampu diterangkan oleh pengaruh konstruk independennya dalam model. Adapun hasil pengujiannya disajikan secara rinci dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji *Coefficient of Determination*

	<i>R-square</i>	<i>Adjusted R-square</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.555	0.540

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Mengacu dari tabel 4, diperoleh angka R^2 sejumlah 0.555 dan *Adjusted R*² sejumlah 0.540. Maknanya, hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya sebesar 55,5% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa mampu diterangkan oleh -variabel independen yang digunakan, sedangkan 44,5% lainnya dikenai pengaruh prediktor selain di dalam studi. Berdasarkan kategori interpretasi umum dalam analisis *Partial Least Square*, nilai ini mencerminkan bahwa model memiliki tingkat kemampuan sedang dalam menjelaskan variabel dependen.

Uji Hipotesis

Pengujian ini dijalankan guna mengidentifikasi pengaruh antar variabel laten berdasarkan model struktural yang dibangun menggunakan metode PLS. Evaluasi diimplementasikan dengan meninjau angka t-statistik dan angka p pada setiap jalur hubungan antar konstruk (*path coefficient*). Suatu hipotesis dinyatakan signifikan dan diterima apabila memenuhi kriteria statistik, yaitu angka $t > 1,96$ dan $p < 0,05$. Hasil pengujian ini ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	Nilai P (P-values)	Ket
SISKEUDES -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa SPIP -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.142	0.150	0.100	1.417	0.157	Ditolak
	0.709	0.704	0.091	7.762	0.000	Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan Tabel 5, Siskeudes belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Hal ini tercermin dari nilai koefisien sebesar 0,142 dengan t-statistik 1,414 dan nilai p sebesar 0,157, yang secara statistik berada di atas ambang signifikansi 5 persen. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh Siskeudes terhadap akuntabilitas tidak dapat diterima. Sebaliknya, hasil berbeda ditemukan pada pengujian SPIP. Variabel ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas, dengan nilai koefisien sebesar 0,709, t-statistik mencapai 7,762, dan p-value 0,000. Berdasarkan hasil ini, hipotesis kedua diterima, yang berarti bahwa semakin baik penerapan SPIP di lingkungan pemerintahan desa, maka semakin tinggi pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Pengaruh Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mengacu pada hasil uji, Siskeudes tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan. Hal tersebut direfleksikan dari angka koefisien beta sejumlah 0.142, t-statistik sejumlah 1.414, dan p-value sejumlah 0.157, yang tidak memenuhi kriteria signifikansi

statistik ($t > 1.96$ dan $p < 0.05$). Maka sebab itu, hubungan antara kedua variabel dinilai tidak signifikan. Meskipun tidak signifikan, koefisien beta yang positif menunjukkan bahwa secara hubungan, peningkatan penerapan Siskeudes cenderung diikuti oleh peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun kontribusinya sangat lemah dan belum cukup kuat secara statistik untuk disimpulkan sebagai pengaruh nyata.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan Siskeudes belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun secara teknis Siskeudes dirancang untuk mempercepat proses pelaporan, meningkatkan transparansi, dan meminimalisir kesalahan administrasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang dilakukan oleh aparatur desa. Tanpa dukungan perilaku yang bertanggungjawab dan berintegritas, sistem informasi keuangan tidak cukup untuk menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dalam hal ini, hasil penelitian tidak selaras dengan teori *stewardship*, yakni memandang bahwa aparat lokal sebagai *steward* atau pelayanan masyarakat seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk mengelola dana publik secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Teori ini berasumsi bahwa keberadaan sistem seperti Siskeudes akan memperkuat perilaku akuntabel bila digunakan oleh individu yang menjunjung tinggi nilai – nilai pelayanan publik. Namun, kenyataannya, sistem belum mampu menghasilkan tata kelola yang lebih baik karena tidak dibarengi dengan kapasitas SDM yang memadai, komitmen terhadap transparansi, dan dukungan infrastruktur.

Beberapa penelitian mendukung hasil ini, seperti kajian oleh Nurak et al. (2023) yang mengindikasikan bahwasanya penerapan Siskeudes belum signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena penggunaannya masih terbatas pada fungsi administratif dan belum disertai dengan internalisasi nilai tanggung jawab oleh aparat desa. Penelitian oleh Safitri & Jaeni (2024)) juga mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan tanggung jawab aparat desa, bukan oleh Siskeudes itu sendiri. Penelitian Reu & Lasdi (2021) juga memperkuat hasil penelitian tersebut dengan memberi simpulan bahwasanya Siskeudes tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan. Hal tersebut diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet, dan kurangnya pemahaman pengguna menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan optimal Siskeudes.

Maka dapat disimpulkan bahwa Siskeudes tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh kapasitas SDM yang memadai, komitmen aparatur desa terhadap transparansi, serta infrastruktur penunjang seperti jaringan internet yang stabil. Tanpa dukungan tersebut, pemanfaatan Siskeudes hanya akan bersifat administratif dan tidak mampu berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan loka. Lebih lanjut, untuk mencapai akuntabilitas yang optimal, dibutuhkan pengadaan sinergi antara penerapan sistem informasi dan penguatan budaya organisasi yang mengedepankan gagasan *stewardship*, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji, SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) ini terbukti memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan signifikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh angka koefisien beta sejumlah 0.709, t-statistik sejumlah 7.762, dan p-value 0.000, yang seluruhnya melebihi ambang batas signifikansi ($t > 1.96$ dan $p < 0.05$). Hasil ini mengindikasikan adanya korelasi kuat dan signifikan pada keduanya.

Hasil penelitian ini menguatkan bahwasanya semakin efektif penerapan SPIP, maka akan semakin tinggi dana desa dikelola secara akuntabel. SPIP memberikan kerangka sistematis dalam prosedur kerja, pelaporan, dan pengawasan yang dapat mengurangi potensi kesalahan dan penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban. Penelitian Savitri et al. (2022), Indriasih & Sulistyowati (2022), Putri et al. (2022) mendukung hasil ini, dengan menegaskan bahwasanya SPIP memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya bila setiap komponen seperti lingkungan terkontrol, penilaian risiko, dan proses yang terkontrol diterapkan secara konsisten. Penelitian Arfiansyah (2020) juga turut mendukung hasil penelitian ini dengan menambahkan bahwa efektivitas SPIP akan optimal bila disertai dengan komunikasi yang baik, lingkungan kerja yang mendukung, dan pengawasan yang aktif dari lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BDP) dan lembaga terkait. Hasil penelitian ini juga sejalan prinsip "*stewardship*" yang memandang bahwasanya aparat desa sebagai pelayan publik dengan tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola dana secara jujur dan bertanggungjawab serta menganggap bahwa SPIP berfungsi bukan untuk mengendalikan perilaku menyimpang tetapi sebagai sarana memperkuat

komitmen bersama terhadap tujuan organisasi.

Penelitian ini memberi simpulan bahwasanya SPIP berperan sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola desa yang akuntabel. Sistem ini tidak hanya menciptakan mekanisme kontrol, tetapi juga menumbuhkan budaya transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap proses penggunaan dana desa. Maka dari itu, menjaga keberlanjutan dan memperkuat penerapan SPIP merupakan langkah strategis dalam mendorong proses pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Siskeudes tidak memengaruhi pengelolaan dana desa yang akuntabel secara signifikan, meskipun secara arah hubungan bersifat positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya keberadaan sistem informasi akuntansi belum cukup tanpa dukungan kapasitas pengguna dan budaya organisasi yang akuntabel. Sebaliknya, SPIP terbukti memengaruhi akuntabilitas secara signifikan, di mana kian membaik penerapan SPIP, maka akan kian tinggi pula tingkat transparansi, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, seperti kesulitan dalam menjangkau responden yang tidak selalu berada di tempat, serta kemungkinan perbedaan antara persepsi responden dan praktik sebelumnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengkaji variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas serta mempertimbangkan pendekatan kualitatif atau metode campuran guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Apresziyanti, D., Wiyekti, N., Wardhani, E., Jati, W., & Arini, S. (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2022 Dan 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Ardianti, P. A. R., & Suartana, I. W. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2839–2851. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p10>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82.
- Eprilsa, S. D., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dan

- Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), 748–757. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING>
- Hasliani, M. Y., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *YUME : Journal of Management*, 4(1), 179–192. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.234>
- Indriasih, D., & Sulistyowati, W. A. (2022). The Role of Commitment, Competence, Internal Control system, Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1), 73–85. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2650>
- Kaharudin, E. (2024). Pengaruh SISKEUDES, SPIP, Kompetensi Aparat, Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 21(2), 71–80.
- Nurak, Y. V., Mitan, W., & Go'o, E. E. K. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nita. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 243–256.
- Putri, A. Z., Indardika, H., Pramudiati, N., & Nusron, L. A. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Akmenika: Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 19(2), 649–656.
- Reu, F. M., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 4(1), 38. <https://journal.prasetyamulya.ac.id/journal/index.php/saki>
- Safitri, N., & Jaeni. (2024). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Edunomika*, 8(1), 1–14.
- Savitri, E., Andreas, Diyanto, V., & Gumanti, T. A. (2022). Accountability Of Village Fund Management In Riau Province. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 131–138. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/index>
- Sihombing, P. R., Arsani, A. M., Oktaviani, M., Nugraheni, R., Wijaya, L., & Muhammad, I. (2024). *Aplikasi Smart PLS 4.0 Untuk Statistisi Pemula*. Minhaj Pustaka.
- Sirait, R. A., & Octavia, E. (2021). Analisis Ringkas Cepat: Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015 - 2020. *Pusat Kajian Anggaran DPR RI*.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Cv.
- Suparno. (2024). Kejari Sidoarjo Ungkap 2 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp 9,7 Miliar. In *DetikJatim*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7679010/kejari-sidoarjo-ungkap-2-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-9-7-miliar>
- Teguh, W. (2024). Terungkap Fakta Kepala Desa Tambakoso Waru, Diduga Mengembalikan Uang Pungli ke Warga. In *Cakrawala.co*. <https://www.cakrawala.co/daerah/77513953657/terungkap-fakta-kepala-desa-tambakoso-waru-diduga-mengembalikan-uang-pungli-ke-warga>